

Keuangan Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Rakhmindyarto dan Syaifullah, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*)

Isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan (*income inequality*) masih menjadi perhatian banyak negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G20, OECD, *the World Bank*, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (*financial inclusion*).

Dalam *Leaders Summit* di Los Cabos Meksiko pada tanggal 18-19 Juni 2012, G20 meluncurkan *Financial Peer Learning Program (FPLP)* dan *Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI)*. Dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan meluncurkan strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi acuan dalam mensinergikan upaya perluasan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin kepada sektor keuangan formal sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penguatan Sektor Keuangan

Banyak penelitian empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara penguatan sektor keuangan khususnya keuangan formal dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan. Di samping itu, sistem keuangan yang inklusif berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Khasnobis dan Mavrotas (2008) mengatakan bahwa mobilisasi yang efektif dari tabungan dalam negeri untuk investasi swasta memainkan peran kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan ekonomi. Beberapa penelitian lain juga menekankan pentingnya keterkaitan antara penguatan sektor keuangan dan penurunan kemiskinan, misalnya studi oleh Beck et al (2004), Green et al (2006), Honohan (2004), dan Claessen dan Feijen (2006). Ahmad dan Malik (2009) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levina, 1997).

Oleh karena itu, keuangan inklusif melalui akses ke layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu kelompok marjinal dan berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko, serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pasar keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan kredit untuk bisnis, manajemen risiko, dan akselerasi dunia usaha dengan menyediakan fasilitas transfer dan pembayaran.

Akses Sektor Keuangan

Sebagian besar masyarakat di dunia, khususnya kelompok miskin dan rentan, tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan (*financial services*). Sebagai contoh, sebanyak 2,7 milyar penduduk dunia tidak memiliki akses kredit, asuransi, dan tabungan (CGAP dan Bank Dunia, 2010). Di Indonesia, menurut Bank Dunia (2010) secara nasional akses ke sistem keuangan formal hanya menjangkau sekitar 52% dari total jumlah penduduk. Di sisi lain, terdapat 31% penduduk mengakses keuangan informal dan 17% penduduk yang mengalami keuangan eksklusif (tidak mengakses sistem keuangan). Masih menurut Bank Dunia (2010), sebanyak 50% penabung menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sedangkan 18% penabung menyimpan di sektor informal seperti arisan, klub tabungan, dan kelompok dana bergulir, sementara 32% lainnya tidak memiliki tabungan. Dalam hal pinjaman, sebanyak 33% masyarakat cenderung memilih menggunakan sektor keuangan informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan dan rentenir dibandingkan dengan sektor keuangan formal, yakni sebesar 17%. Ironisnya, sekitar 40% penduduk tidak memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan baik formal maupun informal.

Ada beberapa faktor yang menghambat akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, akses masyarakat menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap jasa keuangan, rendahnya pendapatan, tidak adanya jaminan dan sosial inklusif. Dari sisi penawaran, beberapa faktor yang seringkali membuat masyarakat tidak dapat mengakses sektor keuangan formal diantaranya jauhnya jarak cabang bank dengan tempat tinggal, prosedur yang rumit, ketidaksesuaian produk keuangan dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dimengerti, perilaku pegawai, dan waktu operasi dari bank yang kaku.

Strategi Keuangan Inklusif dan Peran Kementerian Keuangan

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan barang publik dan oleh karenanya setiap warga negara berhak untuk mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Dalam mensinergikan upaya tersebut diperlukan adanya strategi nasional keuangan inklusif yang nantinya akan menjadi panduan bagi semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap sektor keuangan formal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pengembangan strategi nasional, keuangan inklusif harus difokuskan pada aspek manusianya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul serta menghilangkan berbagai faktor yang menjadi penghambat upaya tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Selain itu, pihak swasta juga dapat melihat bahwa terdapat celah pasar yang sangat besar dari

penduduk Indonesia yang belum tersentuh oleh perbankan bila mereka dapat diraih lewat berbagai strategi yang inovatif.

Dalam implementasinya, keuangan inklusif tidak bisa dilihat secara sempit hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan bertambahnya minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank, tetapi juga harus lebih didorong pada pemberian fasilitas kredit/kredit mikro baik bagi individu, maupun untuk kalangan UMKM. Oleh karena itu, keuangan inklusif harus dilihat atau diposisikan sebagai salah satu strategi dalam pembangunan perekonomian nasional dan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Upaya pengentasan kemiskinan harus mampu memadukan antara sosial inklusif, keuangan inklusif dan ekonomi inklusif. Sosial inklusif memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat menyangkut kebutuhan dasar, khususnya bagi masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan mobilisasi sosial, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi peran pemerintah dalam menyediakan kebutuhan masyarakatnya. Keuangan inklusif memperluas akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dengan meningkatkan kelayakan masyarakat. Sedangkan ekonomi inklusif bertujuan untuk memberikan peluang atau akses terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan, seperti pemberdayaan UMKM.

Dalam kaitannya dengan penyusunan strategi nasional keuangan inklusif, peran Kementerian Keuangan dalam strategi keuangan inklusif sangatlah penting, khususnya terkait dengan penyediaan pembiayaan mikro bagi UMKM yang selama ini kurang tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Akan tetapi, peranan ini belum terekspos optimal dalam strategi nasional keuangan inklusif yang disusun oleh Bank Indonesia karena fokus utamanya adalah mendorong peranan sektor perbankan yang memiliki pangsa pasar terbesar dalam sektor keuangan formal yang menjadi *domain* dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada strategi nasional yang dimaksud dengan memberikan fokus dan porsi yang lebih besar kepada pemberdayaan lembaga keuangan non-bank dalam menyediakan pembiayaan UMKM.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Pegadaian untuk menghapus monopoli PT Pegadaian dengan memberikan izin dan akses bagi swasta untuk membuka pegadaian swasta, bersama Bank Dunia sedang melakukan kajian pengembangan dan penguatan perusahaan modal ventura, dan melakukan sosialisasi peraturan tentang perusahaan penjaminan. Untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki kelebihan likuiditas, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan obligasi ritel dan sukuk ritel dengan nominasi yang lebih terjangkau untuk memberikan alternatif pilihan investasi bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas selain dari tabungan, deposito, reksadana, dan saham (artikel di atas telah dimuat dalam Buku Bunga Rampai Pemikiran Ekonomi Hijau dan Keuangan Inklusif, penerbit Bale Siasat, 2013).

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja